

Membangun Diplomasi Pertahanan Indonesia pada Masa Perang Dingin dibawah Kepemimpinan Presiden Soekarno

Muhammad Ismail Mangkusubroto

Mahasiswa Doktor Studi Pembangunan, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa
Tengah

Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Jawa Barat

Email: imsubroto.79@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas pembangunan dan kekuatan diplomasi pertahanan Indonesia selama masa Perang Dingin, dengan fokus pada upaya Indonesia dalam membangun kapabilitas pertahanan dan mempertahankan kedaulatan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Sebagai negara kepulauan terbesar keempat di dunia, Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam pembinaan teritorial dan pertahanan. Artikel ini mengkaji bagaimana Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, memanfaatkan kebijakan luar negeri bebas aktif untuk menjalin hubungan dengan kedua blok, baik Blok Barat maupun Blok Timur, tanpa terikat pada salah satu pihak. Diplomasi pertahanan Indonesia pada masa ini ditandai dengan kerjasama militer serta pembelian alutsista. Selain itu, misi-misi militer seperti Misi Yani menunjukkan fleksibilitas Indonesia dalam menjalin kerjasama pertahanan dengan berbagai negara, tanpa memandang blok politik. Meskipun terminologi "diplomasi pertahanan" baru muncul pasca-Perang Dingin, praktiknya telah dilakukan Indonesia sejak era 1950-an melalui pengiriman atase militer dan perwira TNI untuk pendidikan di luar negeri. Artikel ini menyimpulkan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia pada masa Perang Dingin berhasil menciptakan posisi tawar yang kuat di panggung internasional, meskipun menghadapi tantangan dari negara-negara yang tidak mendukung kemerdekaan Indonesia. Keberhasilan ini didukung oleh integrasi kekuatan militer dan non-militer, serta komitmen pada prinsip pertahanan semesta yang melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional.

Kata Kunci: Diplomasi Pertahanan Indonesia

Abstract

This article discusses the development and strength of Indonesia's defense diplomacy during the Cold War, focusing on Indonesia's efforts to build defense capabilities and maintain national sovereignty amid global geopolitical dynamics. As the world's fourth largest archipelago, Indonesia faces complex challenges in territorial and defense development. This article examines how Indonesia, under the leadership of President Soekarno, utilized a free and active foreign policy to establish relations with both the Western and Eastern Blocs without being tied to either party. Indonesia's defense diplomacy during this period was marked by military cooperation and the purchase of defense equipment. In addition, military missions such as the Yani Mission showed Indonesia's flexibility in establishing defense cooperation with various countries, regardless of political blocs. Although the terminology of "defense diplomacy" only emerged after the Cold War, Indonesia has been practicing it since the 1950s through sending military attachés and TNI officers for education abroad. This article concludes that Indonesia's defense diplomacy during the Cold War succeeded in creating a strong bargaining position on the international stage, despite facing challenges from countries that did not support Indonesia's independence. This success was supported by the integration of military and non-military forces, as well as a commitment to the principle of universal defense involving all people and national resources.

Keywords: Indonesian Defense Diplomacy



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Berdasarkan luas wilayahnya, Indonesia menempati urutan keempat belas negara terbesar di dunia. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dengan luas daratan 1.922.570 km dan luas perairan mencapai 3.257.483 km. Bentangan wilayah tersebut terdiri atas lima pulau besar yakni Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Pada tahun 2010, menurut survey geografi dan topografi yang telah dilaporkan kepada PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia tercatat sebanyak 13.466 pulau.¹ Wilayah Indonesia yang sangat luas membutuhkan pembinaan territorial. Tujuan dari pembinaan territorial adalah untuk mewujudkan medan atau geografi atau wilayah atau ruang juang, yang tidak hanya berupa fenomena geografi yang alami tetapi geografi yang non-alami, yaitu sarana dan prasarana pendukung lainnya; alat juang atau sumber daya manusia yang siap berjuang mempertahankan NKRI dan juga sarana buatan; dan menciptakan kondisi juang yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan.² Unsur-unsur tersebut diharapkan siap untuk diterapkan dalam Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) sesuai dengan koridor hukum nasional dan internasional, apabila diperlukan disaat yang akan datang.

Dalam sistem pertahanan negara, terdapat beberapa unsur yang dianut dalam sistemnya yaitu bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman; pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.³ Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya. Bagi bangsa Indonesia, perang adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan apabila semua usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil. Prinsip ini menunjukkan pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai; dan Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Untuk itu, pertahanan negara ke luar bersifat defensif aktif yang berarti tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam; bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan; pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Di samping prinsip tersebut, pertahanan negara juga memperhatikan prinsip kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan sosial.⁴

Pada konteks pertahanan negara, yang dimaksud dengan hal tersebut adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁵ Sedangkan sistem pertahanan negara adalah sebuah sistem yang bersifat semesta serta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut demi tegaknya kedaulatan negara,

¹ Makmur Supriyatno, *Tentang Ilmu Pertahanan* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014) 387.

² *Ibid.* Hal. 388

³ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, "Tanggapan Atas Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Penguatan Sistem Pertahanan Negara", Badan Pembinaan Hukum TNI (September 2016) internet, 13 Juli 2019, www.bphn.go.id

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

keutuhan wilayah, dan segenap bangsa dari segala ancaman.⁶ Sistem pertahanan negara apabila menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utamanya dan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan, penyelenggaraan sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.⁷

Dalam melaksanakan diplomasi pertahanan, terdapat unsur-unsur pendukung dalam kegiatannya. Hal-hal yang harus menjadi pertimbangan yaitu jumlah atase pertahanan Indonesia di luar negeri dan sebaliknya jumlah atase pertahanan asing di Indonesia. Selain itu, juga jumlah perjanjian yang telah ditandatangani dan yang akan di proses untuk menjadi sebuah perjanjian. MoU yang telah ditandatangani, dan mobilitas pendidikan dan kursus serta kepelatihan, baik ke luar maupun ke dalam negeri yang terus meningkat.⁸ Hal ini dapat diartikan bahwa diplomasi merupakan suatu skill atau keahlian untuk mendapat kemenangan atau mencapai kepentingan tanpa harus membuat permusuhan. Diplomasi pertahanan, dengan demikian, dapat bermaksud sebagai suatu cara dalam memetik atau mencapai kepentingan nasional negara dengan menggunakan kekuatan militer sebagai media atau alat tanpa mengandung unsur kekerasan. Diplomasi pertahanan juga merupakan serangkaian kegiatan yang umumnya dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan atau juga bisa melalui institusi pemerintah lain, contohnya TNI Angkatan Darat, tujuannya yakni mencapai kepentingan nasional pada bidang pertahanan dan pertahanan. Selanjutnya, cara yang ditempuh baru menggunakan jalan negosiasi serta alat diplomatik lainnya. Dewasa ini, Indonesia melahirkan suatu konsep yang juga disebut dengan diplomasi total. Dalam diplomasi ini, semua unsur atau pemangku kepentingan yang berkaitan dengan diplomasi diminta untuk aktif berperan karena hal ini merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa. Yang dimaksud dengan komponen bangsa antara lain komponen utama yang di dukung komponen cadangan dan komponen pendukung dan juga unsur utama yang di dukung dengan unsur lain sebagai kekuatan bangsa. Diplomasi Indonesia akan semakin kuat apabila semua komponen bangsa ikut andil dalam mempromosikan dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

MEMBANGUN DIPLOMASI PERTAHANAN

Periode tahun 1950-1960, Indonesia yang saat itu masih dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang gencar membangun Angkatan Perang baik dari segi TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Indonesia juga pada kurun waktu tersebut masih merupakan negara yang baru lahir serta sedang memulai membuka komunikasi dengan negara-negara yang lain. Dengan kebijakan luar negeri politik bebas aktif, Indonesia dalam pergaulan internasional tidak memilih-milih negara untuk dijadikan teman. Meskipun di era tersebut sedang terjadi Perang Dingin, Indonesia tidak terpengaruh akan hal ini. Baik negara dari Blok Barat ataupun Timur, Indonesia bisa berteman asal sama-sama mendukung Indonesia dalam panggung internasional. Kekuatan Diplomasi Pertahanan Indonesia dapat dilihat pada masa Presiden Soekarno dan pada saat era tersebut, Indonesia dekat dengan negara mana pun, termasuk dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Alutsista militer Indonesia pada masa tersebut juga banyak yang berasal dari Amerika Serikat maupun Uni Soviet, namun masih tetap didominasi oleh negara Blok Timur, terutama Uni Soviet. Pada masa Presiden Soekarno, pemasok alutsista terbesar memang dari Uni Soviet, dan

⁶ *Op.Cit.*

⁷ *Op.Cit.*

⁸ Makmur Supriyatno, *Tentang Ilmu Pertahanan*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014) 180.

⁹ Triyoga Budi Prasetyo, Sugeng Berantas, "Diplomasi Pertahanan sebagai Bagian dari Diplomasi Total RI", *Jurnal Pertahanan*, Vol. 4 No. 2 (Agustus, 2014), 165.

negara tersebut sangat mendukung penuh Indonesia dalam meningkatkan kapasitas militernya dengan membantu dari segi alutsista. Hal ini nampak pada saat Indonesia mempersiapkan diri untuk Operasi Militer Perebutan Irian Barat. Pada saat itu, Indonesia menerima pesawat tempur MIG, kapal perang, dan senjata-senjata laras panjang modern dari Uni Soviet. Hasilnya, pada saat Operasi Militer, pihak lawan yang masih menggunakan persenjataan zaman Perang Dunia Dua kalah dari segi alutsista dengan Indonesia.

Dalam urusan pertahanan dan militer, Indonesia tidak memilih-milih untuk berteman dengan militer dari negara mana pun. Seluruh negara disambut dengan baik oleh Indonesia. Hal ini bisa dilihat pada saat Misi Yani yang dilakukan oleh Indonesia melalui TNI Angkatan Darat pada tahun 1959. Misi Yani yang dilakukan oleh Kolonel Inf. Ahmad Yani beserta staffnya pada tahun tersebut membeli peralatan tempur dan melakukan beberapa perjanjian terkait dengan pertahanan. Selain itu, negara yang dikunjungi dalam Misi Yani antara lain, Yugoslavia, Denmark, Swedia, Cekoslovakia, Amerika Serikat, Jerman Barat, Inggris, Perancis, Polandia, Pakistan, dan Italia. Berdasarkan negara-negara yang dikunjungi saat Misi Yani, terlihat beberapa negara masuk ke Blok Barat dan Blok Timur, tetapi dalam hal ini, Indonesia tidak melihat dari perspektif blok di masa Perang Dingin. Hal terpenting yaitu Indonesia dapat membeli persenjataan dari negara tersebut, dan mendapat dukungan untuk mencapai kepentingan nasional. Walaupun Indonesia sedang membangun kekuatan militernya, tetapi dalam hal ini, Indonesia tidak menerapkan sebagai bentuk perlombaan senjata. Melainkan hal ini untuk menunjukkan upaya dalam meraih kepentingan nasional dan pencapaian standar profesionalisme Tentara Nasional Indonesia. Pembangunan pertahanan negara dilakukan tetap dalam tujuan atau orientasi pada keterpaduan pertahanan militer dan non-militer, dan dalam rangka menghadapi segala ancaman. Secara perlahan, Indonesia terus meningkatkan kapabilitas pertahanan negara yang memiliki daya tangkal melalui pembangunan postur angkatan bersenjata.

Diplomasi Pertahanan pertama kali dikemukakan dari buku *Strategic Defense Review* oleh Departemen Pertahanan Inggris pada tahun 1998. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa Diplomasi Pertahanan merupakan suatu yang baru dalam kaitannya dengan pertahanan. Istilah Diplomasi Pertahanan sendiri, digunakan setelah Perang Dingin berakhir dan runtuhnya negara Uni Soviet. Sehingga fokus utama dari Diplomasi Pertahanan adalah untuk mempengaruhi negara pecahan Uni Soviet, negara yang sebelumnya ikut dalam Pakta Warsawa, dan negara Russia sendiri.¹⁰ Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa alasan mengapa sebuah Diplomasi Pertahanan dilaksanakan. Terdapat lima alasan antara lain, tugas-tugas militer akan semakin meningkat, terutama peningkatan lebih menonjol pada tugas-tugas militer yang tidak biasa dilakukan atau bukan sebuah tugas yang bersifat operasional. Pecahnya negara Uni Soviet dan Pakta Warsawa, karena memang Diplomasi Pertahanan muncul setelah Perang Dingin berakhir serta Blok Timur bubar. Negara-negara bekas Pakta Warsawa yang dianggap belum merupakan negara demokratis dan pertahanan atau militernya belum dikelola oleh sipil. Negara Blok Barat yang menganggap negaranya demokratis beranggapan, bahwa permasalahan pertahanan telah dikelola, diawasi, dan dikendalikan oleh kalangan sipil. Termasuk masalah pengelolaan anggaran pertahanan. Muncul tugas-tugas militer dan pelaksanaan Diplomasi Pertahanan dilakukan oleh kalangan sipil. Terakhir, adanya tugas-tugas militer atau pengerahan personil secara individual. Misalnya, perbantuan personil militer, sebagai penasihat atau sebagai anggota dari misi tertentu.¹¹

Berdasarkan poin di paragraf sebelumnya, Menteri Pertahanan Inggris telah mengembangkan Diplomasi Pertahanan menjadi suatu kegiatan yang diformulasikan secara

¹⁰ *Op.Cit.* Hal. 161

¹¹ *Ibid.* Hal.165

luas menyangkut kegiatan-kegiatan militer yang sudah atau baru dilaksanakan saat itu. Kegiatan lain yang termasuk dalam Diplomasi Pertahanan antara lain pertukaran pengiriman prajurit untuk mengikuti pendidikan, mengikuti pelatihan, pertukaran atau pengiriman Atase Pertahanan ke luar negeri yang telah dilakukan oleh Inggris dan juga Indonesia. Diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia tepatnya kapan pertama kali dilakukan belum diketahui dan masih harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Namun, pasca kemerdekaan Indonesia, para perwira-perwira TNI Angkatan Darat sudah ada yang dikirim ke luar negeri. Baik itu melakukan pendidikan atau menjadi Atase Militer. Seperti yang dilakukan oleh Indonesia pada tahun 1955 yaitu mengirim Letkol Inf. Ahmad Yani untuk mengikuti pendidikan Seskoad di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat. Lalu, pada tahun 1964, Indonesia kembali mengirim salah satu Perwira Tinggi ke sekolah tersebut yakni Brigjen TNI D.I. Panjaitan.

Pengiriman Atase Militer pun sudah dilakukan oleh Indonesia sejak tahun 1950an. Pada tahun tersebut, Kolonel D.I. Panjaitan menjabat sebagai Atase Pertahanan di Jerman Barat, Kolonel Sutoyo Siswomiharjo dan Kolonel S. Parman pun pernah menjabat sebagai Atase Pertahanan di Inggris. Walaupun pada tahun tersebut Indonesia merupakan yang baru dan Diplomasi Pertahanan belum ada, tetapi kegiatan-kegiatan yang merupakan unsur dari Diplomasi Pertahanan telah dilakukan. Diplomasi Pertahanan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu dan para ahli terus akan mengembangkan konsep-konsep yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Sedangkan para praktisi, memberikan saran-saran dan menjalankan serta mengembangkan Diplomasi Pertahanan. Masih harus ada penelitian lebih lanjut tentang Diplomasi Pertahanan agar bermanfaat bagi perdamaian dunia.¹²

Berdasarkan wawancara dengan Dandim 0502/Jakarta Utara, Kolonel Inf. Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, Ph.D, praktek Diplomasi Pertahanan sudah dilakukan oleh Indonesia sejak zaman Presiden Soekarno. Namun, pada saat itu masih belum ada terminologi Diplomasi Pertahanan, dan terminologi tersebut baru ada setelah Perang Dingin selesai tepatnya di tahun 1998. Secara konkrit, Diplomasi Pertahanan menurut Frega Wenas baru muncul pada Buku Putih tahun 2008 pertama kalinya, dan pada tahun 2015 lebih banyak munculnya terminologi Diplomasi Pertahanan. Pada Buku Putih tahun 2015 juga, menurut Frega Wenas juga lebih detail terkait dengan Diplomasi Pertahanan siapa fasilitator serta aktornya. Pada masa Kolonialisme dan Perang Dunia II, menurut Frega Wenas, Diplomasi Pertahanan Indonesia agak susah untuk ditinjau karena pada masa tersebut, Indonesia belum terbentuk menjadi sebuah negara yang berdaulat. Namun, beliau berpendapat bahwa pada masa Revolusi Fisik Indonesia sudah memiliki Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai organisasi keamanan. Melakukan praktek Diplomasi Pertahanan agak susah pada masa ini karena negara mitra sangat terbatas. Jadi, yang digunakan yaitu gerilya kemudian dikomunikasikan dengan para diplomat sipil yang bertugas di luar negeri kemudian memberi informasi bahwa Indonesia masih memiliki tentara.

Masa Perang Dingin, Diplomasi Pertahanan Indonesia sangat terlihat. Frega Wenas memberikan beberapa contoh diantaranya, Indonesia pada masa Presiden Soekarno pernah mensuplai persenjataan di Afrika untuk melakukan perlawanan, melakukan misi kapal selam rahasia ke Pakistan dalam Perang India-Pakistan, dan membangun armada dengan Uni Soviet sehingga menjadikan Indonesia memiliki angkatan bersenjata terkuat ketiga di Asia. Selain itu, beliau juga berpendapat bahwa dikirimnya Perwira-perwira TNI dari Indonesia seperti Jenderal TNI Ahmad Yani, Mayjen TNI D.I. Panjaitan untuk sekolah di luar negeri juga merupakan bagian dari Diplomasi Pertahanan Indonesia. Pada masa periode Presiden Soekarno dan masih dalam masa Perang Dingin, terminologi Diplomasi Pertahanan belum

¹² *Op.Cit.* Hal.166

muncul, jadi aktivitas-aktivitas diplomasi pertahanan masih masuk ke dalam kategori diplomasi secara umum atau kerjasama pertahanan. Periode Perang Dingin, Indonesia sudah resmi berdiri menjadi sebuah negara yang berdaulat. Dengan demikian, Indonesia menempatkan Atase-atase militernya di luar negeri, dan ini merupakan aktor kunci (fasilitator). Selanjutnya, pada masa Presiden Soekarno juga Indonesia memiliki angkatan perang terbesar di Asia dan menjadikan Indonesia memiliki bargaining position. Lalu, Diplomasi Pertahanan sendiri, tanpa melibatkan militer yang professional baik dari alutsistanya maupun personilnya, ini akan sulit untuk dilakukan. Diplomasi Pertahanan yang dilaksanakan oleh Indonesia pada masa Presiden Soekarno juga memiliki titik lemah. Kelemahan ini yaitu Indonesia masih sebuah negara yang baru terbentuk, dan ada beberapa pihak yang tidak mendukung kemerdekaan Indonesia seperti Belanda dan pendukungnya. Ditambah, dengan kondisi Perang Dingin, karena Indonesia tidak memihak blok, beberapa negara Blok Barat membatasi ruang geraknya untuk Indonesia. Terutama dibidang militer, termasuk untuk pembelian alutsista.

KESIMPULAN

Pembangunan serta kekuatan diplomasi pertahanan Indonesia pada masa Perang Dingin, khususnya di era Presiden Soekarno, mencerminkan kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan kebijakan luar negeri bebas aktif untuk membangun kapabilitas pertahanan dan mempertahankan kedaulatan nasional. Sebagai negara kepulauan yang luas dengan tantangan geografis dan geopolitik yang kompleks, Indonesia berhasil menjalin hubungan dengan kedua blok, baik Blok Barat maupun Blok Timur, tanpa terikat pada salah satu pihak. Diplomasi pertahanan Indonesia pada masa itu juga ditandai dengan fleksibilitas dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara dari kedua blok, seperti yang terlihat dalam Misi Yani. Meskipun terminologi "diplomasi pertahanan" baru muncul pasca-Perang Dingin, praktiknya telah dilakukan Indonesia sejak era 1950-an melalui pengiriman atase militer dan perwira TNI untuk pendidikan di luar negeri. Keberhasilan diplomasi pertahanan Indonesia pada masa Perang Dingin didukung oleh integrasi kekuatan militer dan non-militer, serta komitmen pada prinsip pertahanan semesta yang melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Yani, Ibu. (1981). *Ahmad Yani Sebuah Kenang-Kenangan*. P.T. Jayakarta Agung Offset.
- Budi Prasetyo, Triyoga. Dkk. (2014) Diplomasi Pertahanan Sebagai Bagian Dari Diplomasi Total Ri. *Jurnal Pertahanan*, (4), 2.
- Dinas Sejarah Angkatan Darat. (2013). *Achmad Yani Prajurit Patriot Sejati*. Cv. Idhar Bandung
- Frega Wenas Inkiriwang, Diwawancarai Oleh M. Ismail Mangkusubroto, 24 Agustus 2022, Kodim 0502/Jakarta Utara.
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, "Tanggapan Atas Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Penguatan Sistem Pertahanan Negara", Badan Pembinaan Hukum TNI (September 2016) internet, 13 Juli 2019, www.bphn.go.id
- Sabir, M. (1987). *Politik Bebas Aktif*. CV Haji Masagung.
- Samsul Bahari, diwawancarai oleh M. Ismail Mangkusubroto, 12 Oktober 2022, Kementerian Pertahanan Indonesia.
- Supriyanto, Makmur. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan* Yayasan Pustaka Obor Indonesia.